



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN II

## TAHUN 2025

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
BANYUWANGI**

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain. Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Banyuwangi.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BPPP Banyuwangi bantuan perangkat lunak berbasis Logical Framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. *Performance* BPPP Banyuwangi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BPPP Banyuwangi Tahun 2025 sebagai kontrak kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 yang mana IKU BPPP Banyuwangi merupakan hasil cascading dari IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan, IKU Level I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BPPSDMKP) dan IKU Level II Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian

kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan penyuluhan masyarakat KP serta dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. BPPP Banyuwangi melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Banyuwangi serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, Namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi kepada yang berkepentingan.

Banyuwangi, 15 Juli 2025

Kepala Balai



# DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Keragaan SDM.....	5
1. 5 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
1.6. Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Visi.....	11
2.1.2. Misi.....	12
2.1.3. Tujuan.....	13
2.1.4. Sasaran Program.....	13
2.1.5. Rencana Kerja Tahunan.....	15
2.2. Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi.....	15
2.3. Pengukuran Kinerja.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS.....	20
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama.....	20
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025.....	63
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi.....	64
BAB IV. PENUTUP.....	65
4.1. Capaian Kinerja Utama.....	66
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	68

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025 .....	viii
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025 .....	21
Tabel 3. Capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi .....	24
Tabel 4. Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi .....	24
Tabel 5. capaian indikator Kinerja 2 Triwulan II Tahun 2025 .....	27
Tabel 6. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	28
Tabel 7. Indikator kinerja Triwulan II Tahun 2025 .....	30
Tabel 8. Perbandingan realisasi Nilai PNPB Triwulan II Tahun 2025 .....	31
Tabel 9. Capaian indikator kinerja 12 Tahun 2025 .....	34
Tabel 10. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	35
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja 9 Tahun 2025 .....	37
Tabel 12. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	38
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025 .....	39
Tabel 14. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	40
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 13 Tahun 2025 .....	43
Tabel 16. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	44
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 14 Tahun 2025 .....	47
Tabel 18. Perbandingan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	48
Tabel 19. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) .....	50
Tabel 20. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	51
Tabel 21. Capaian indikator Kinerja 16 Tahun 2025 .....	53
Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	54
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja 17 Tahun 2025 .....	56
Tabel 24. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	57
Tabel 25. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi .....	60
Tabel 26. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP .....	61
Tabel 27. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025 .....	66

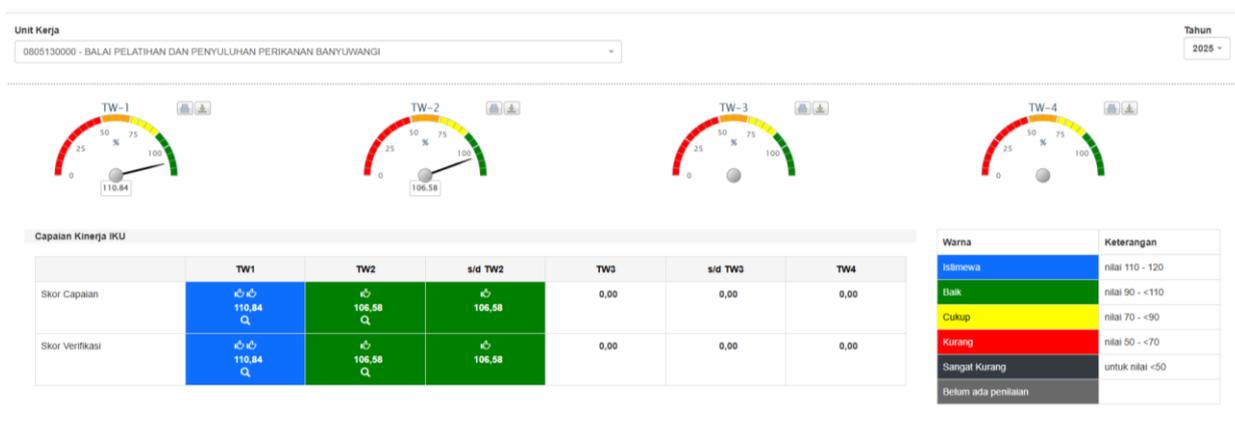
# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II.....	7
Gambar 2. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025 .....	4
Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 BPPP Banyuwangi .....	20

# RINGKASAN EKSEKUTIF

BPPP Banyuwangi pada Triwulan II Tahun 2025 memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 4 dari 6 Sasaran Strategis dan 12 dari 20 Indikator Kinerja Utama dengan 4 IK berstatus biru dan 8 IK berstatus hijau. Pada Triwulan II terdapat tambahan 1 sasaran strategis yaitu Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sasaran strategis tersebut memuat indikator kinerja utama yaitu Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. I

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi di tingkat korporat Triwulan II Tahun 2025 sebesar **106,58%**.



Gambar 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II

Tabel 1. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
<b>I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	70	70	100
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	300	300	100
3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,10	0,11	110
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
<b>II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>					
5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
6	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
<b>III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>					
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	50	52,73	105,46
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	70	76,56	109,37
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP	80	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
	BPPP Banyuwangi (Nilai)				
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
13	"Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)"	80	80	100	120
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	84	99,76	118,76
<b>IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
15	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	1.800	1.900	105,56
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	20	20	100
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791	25	30	120
18	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	3	3	100
<b>V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan</b>					
19	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
<b>VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
20	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	-	-	-

# BAB I

## **Pendahuluan**

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas dan Fungsi
4. Keragaan SDM
5. Sistematika Laporan Kinerja
6. Potensi dan Permasalahan

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN, Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang merupakan salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada Tahun 2025 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah sesuai yang tertuang pada RENSTRA BPPP Banyuwangi.

Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa

kinerja yang dicapai BPPP Banyuwangi serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPPP Banyuwangi guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalandengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPPP Banyuwangi Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi

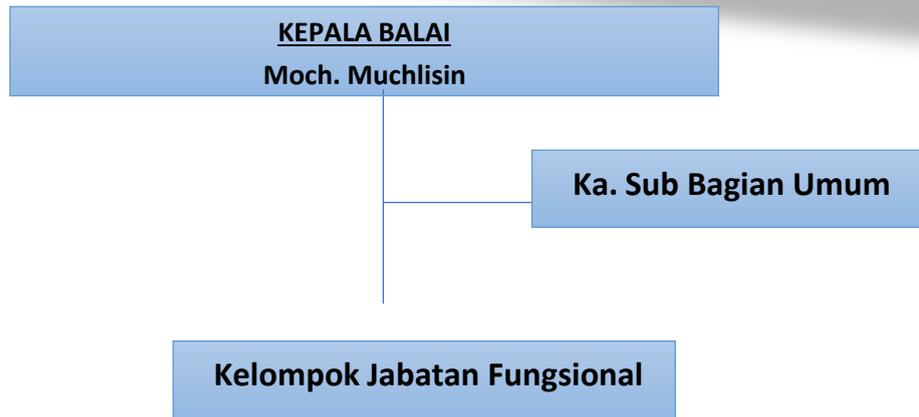
## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Triwulan II BPPP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2025.
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Banyuwangi Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerjanya sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER- 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur organisasi BPPP Banyuwangi Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas BPPP Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
- d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis danmanajerial dibidang perikanan
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utamadan pelaku usaha
- h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

#### 1.4. Keragaan SDM

Dalam mendukung kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025, jumlah SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi pelatihan dan penyuluhan. Perkembangan jumlah SDM Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, berikut data jumlah pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	24
4.	Widyaiswara	2
5.	Analisis kepegawaian	1
6.	Analisis pengelola keuangan APBN	2
7.	Pranata Keuangan APBN	4
8.	Fungsional Umum	35
9.	Penyuluh Perikanan PNS	299
10.	Penyuluh Perikanan PPPK	103
11.	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	188
12.	Pramubakti	20
Total		680

#### 1.5 Sistematis Laporan Kinerja

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Triwulan II BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 adalah:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b. PP No 08 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 53 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**LKJ BPPP  
Banyuwangi  
mengacu pada  
Peraturan Menteri  
Pendayagunaan  
Aparatur Negara  
dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 53  
Tahun 2014**

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024
- **Bab I Pendahuluan**, menyajikan hal-hal umum tentang BPPP Banyuwangi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Banyuwangi pada Tahun 2024
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian singkat tentang Rencana Strategis BPPP Banyuwangi 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2024 serta Pengukuran Kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
- **Bab IV Penutup**, menyajikan uraian singkat terkait kesimpulan, pemmasalahan dan rekomendasi.
- **Lampiran**, menyajikan pendukung laporan seperti Perjanjian Kinerja, Surat tugas penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran per IKU

## 1.6. Potensi dan Permasalahan

### a. Potensi

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan pada wilayah kerja di untuk pelatihan berada pada 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sedangkan untuk wilayah kerja penyuluhan ada 2 propinsi yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kegiatan penyuluhan bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan serta penyusunan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian karena adanya potensi sumberdaya BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Memiliki SDM yang berpengalaman di bidangnya
2. Memiliki sarpras diklat yang memadai dan representatif
3. Penyelenggarakan diklat bidang kepelautan
4. Memiliki lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP) I KP yang telah dilisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi ( TUK) LSP Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)

6. komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia KP untuk mengembangkan mutu diklat

**b. Permasalahan**

Sebagai lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

❖ Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM BPPP Banyuwangi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP seperti di Wilayah Perbatasan, SKPT dan lainnya
6. Adanya kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas sehingga membuat rencana pelatihan di berbagai daerah terhambat dilaksanakan karena minimnya anggaran

❖ Aspek ketenagaan penyuluh perikanan

Ketenagaan penyuluh perikanan dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:

- a. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal
- b. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan

dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh

- c. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan dilapangan
- d. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kotapotensi perikanan
- e. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi,informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya
- f. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis)yang masih kurang.
- g. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia
- h. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai
- i. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh
- j. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas

## BAB II

# Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja Tahunan
3. Penetapan Kinerja (PK)  
BPPP BANYUWANGI
4. Pengukuran kinerja

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

#### **2.1.1. Visi**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi BPPP Banyuwangi pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visiBPPSDMKP dan Puslatluh yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

### **2.1.2. Misi**

Misi BPPP Banyuwangi adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM, Puslatluh dalam bidang kelautan dan perikanan. Misi Presiden Prabowo yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Berdasarkan 8 misi presiden tersebut, BPPP Banyuwangi mendukung misi ke 3, 4, dan 6. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan Bersama.

### **2.1.3. Tujuan**

Tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan Puslatluh. Untuk itu tujuan BPPP Banyuwangi adalah menghasilkan SDMKP mandiri dan kompeten yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri serta mampu menjadi wirausaha dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara optimal serta sadar dan peduli terhadap keberlanjutan sumberdaya KP, dengan indikator tujuan adalah:

1. Tersedianya lembaga pelatihan dan penyuluhan KP sesuai dengan standar
2. Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar
3. Tersedianya tenaga pelatihan dan kepelatihan yang profesional
4. Peserta latih yang kompeten
5. Jumlah kelompok pelaku utama yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya
6. Penyuluh perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

### **2.1.4. Sasaran Program**

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 5 (lima) Sasaran Strategis yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
2. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen eselon I dan Satker

BPPP Banyuwangi memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai di triwulan II tahun 2025.

Sasaran strategis pertama (SK.01) yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan ", dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi (orang)
2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Banyuwangi (orang)
3. Nilai PNBSP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Milyar)
4. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

Sasaran strategis kedua (SK.02) yang akan dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja:

1. Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)
2. Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)

Sasaran Strategi ketiga (SK.03) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)
2. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)
3. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)
6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)

Sasaran strategis keempat (SK.04) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)
2. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)

3. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)
4. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)

Sasaran strategis kelima (SK.05) yang akan dicapai adalah Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket).

Sasaran Strategis keenam (SK.06) Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi .

### 2.1.5. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025 menetapkan program yaitu kegiatan pelatihan dan Penyuluhan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.785.524.000 dengan rincian kegiatan, yaitu :

Tabel 2. Rencana kerja tahun Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan	104.692.970.773
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	92.553.227
<b>Total Anggaran BPPP Banyuwangi</b>		<b>104.785.524.000</b>

### 2.2. Penetapan Kinerja (PK) BPPP Banyuwangi

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja BPPP Banyuwangi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja tahun 2025

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2025</b>
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353
3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120
5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1
6	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85
11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80
13	"Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)"	80
14	Nilai IKPA BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
15	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi (kelompok)	5.996
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	216
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791
18	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44
19	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1
20	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15

## 2.3. Pengukuran Kinerja

### 2.3.1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum atau istimewa adalah 120;
- b. Angka minimum atau belum ada penilaian adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- d. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Capaian Kinerja IKU + IKM

### 2.3.2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Banyuwangi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Triwulanan dipantau oleh Tim Teknis Kelola Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung

jawab kegiatan melaporkannya kepada kepala Balai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Kerja Program dan Monev merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

## BAB III

# Akuntabilitas

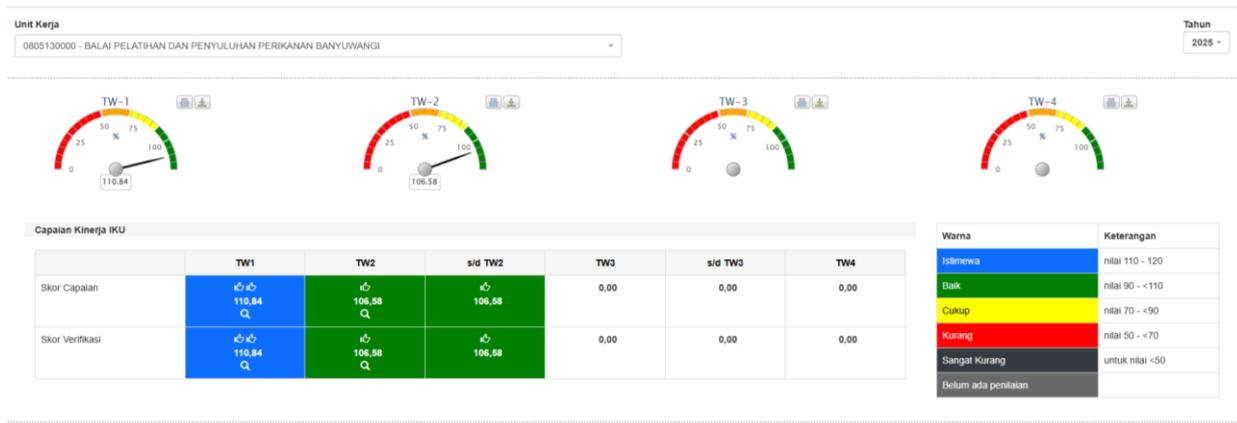
1. Prestasi Indikator Kinerja Utama
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan  
**Tahun 2025**
4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi  
Sumber Daya BPPP Banyuwangi

## BAB III. AKUNTABILITAS

### 3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025 di tingkat korporat sebesar 106,58% sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut :



Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 BPPP Banyuwangi pada situs [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Banyuwangi Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi

agar sasaran-Sasaran Kegiatan dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Banyuwangi yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
<b>I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	70	70	100
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	300	300	100
3	Nilai PNBPN Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,10	0,11	110
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
<b>II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>					
5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
6	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
<b>III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>					
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	50	52,73	105,46
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	70	76,56	109,37

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	-	-	-
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)"	80	80	100	120
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	84	99,76	118,76
<b>IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
15	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	1.800	1.900	105,56
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	20	20	100
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791	25	30	120
18	Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)	44	3	3	100
<b>V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan</b>					
19	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial	1	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
	Ekonomi Kelautan dan Perikanan				
<b>VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
20	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	-	-	-

### **Sasaran Program 1**

#### **Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan**

Untuk mewujudkan Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan dengan IKU pendukung sebanyak 4 IKU dan dukungan anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu awal sebesar Rp 310.510.000 dan realisasi sebesar Rp, 9.441.400,00 dengan persentase 3,03%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

#### **Indikator Kinerja Utama 1**

#### ***Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (orang)***

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan jumlah lulusan pelatihan yang menjadi indikator untuk mengukur banyaknya lulusan pelaku utama/pelaku usaha yang menerapkan hasil pelatihan, yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta bekerja di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendataan terhadap purnawidya yang terserap di DUDI dalam IKU ini mencakup peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan selama 6 bulan terakhir. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi

IKU 1. Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi Orang)								
Realisasi TW 2			2025				Renstra BPPP Banyuwangi 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
4842	4.808	6.438	70	70	100	-98,91	3.763	1,86

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian kinerja BPPP Banyuwangi baru mencapai 70 orang dari target triwulan II sebanyak 70 orang, atau sekitar 100%. Persentase ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah cukup baik, walaupun masih berada jauh di bawah harapan jika dihadapkan pada target tahunan yang mencapai 3.763 orang sehingga memerlukan percepatan untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan walaupun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang mencapai 6.438 orang, realisasi kinerja pada tahun 2025 hingga Triwulan II hanya sebesar 70, atau setara dengan sekitar 1,09% dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja yang sangat signifikan, yaitu sebesar -98,91% yang diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Capaian kinerja BPPP Banyuwangi hingga Triwulan II Tahun 2025 baru mencapai 1,86% dari target Renstra tahun 2025 sebesar 3.763. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi program masih sangat rendah dibandingkan dengan perencanaan strategis, sehingga perlu dilakukan upaya akselerasi dan penyesuaian strategi untuk mengejar ketertinggalan dalam semester berikutnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Tabel 4. Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP

### Banyuwangi

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4539	5240	115,44
2	BPPP Banyuwangi	70	70	100,00
3	BPPP Ambon	30	40	120,00

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lainnya, capaian kinerja BPPP Banyuwangi dalam indikator lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri menunjukkan hasil yang cukup baik secara persentase, namun relatif kecil dalam jumlah realisasi. BPPP Banyuwangi mencatat realisasi 100%, yaitu 70 dari 70 peserta yang ditargetkan berhasil terserap. Sementara itu, BPPP Tegal mencatat capaian tertinggi secara kuantitatif, dengan realisasi 5.240 lulusan dari target 4.539 (115,44%), dan BPPP Ambon mencatat realisasi 40 lulusan dari target 30 (120%). Meskipun total lulusan BPPP Banyuwangi lebih sedikit dibandingkan Tegal dan Ambon, pencapaian 100% terhadap target menunjukkan bahwa seluruh target peserta berhasil diarahkan dan difasilitasi untuk terserap di dunia kerja, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelatihannya dalam skala yang ditetapkan.

#### E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

- a) Penerapan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
- b) Tenaga pelatih yang berkompeten dan tersertifikasi
- c) Rekrumen peserta latih diprioritaskan anggota kelompok binaan penyuluh perikanan dan telah memiliki kartu kusuka, sebagai bagian dari pengukuran pencapaian indikator lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

#### F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan peran penyuluh perikanan secara langsung di lapangan guna efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan.
- b) Memudahkan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk *softcopy*

sesuai dengan format yang ditetapkan.

#### G. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Upaya strategis BPPP Banyuwangi dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase lulusan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri diantaranya:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
2. Melakukan pendataan purnawidya berdasarkan wilayah dan kompetensi bidang pelatihan yang diikuti.
3. Mengklasifikasikan peserta sebagai pelaku utama/pelaku usaha perikanan, baik yang telah memiliki kelompok usaha maupun yang bekerja di perusahaan perikanan
4. Melaksanakan Evaluasi Pasca Diklat (EPD) untuk mengukur efektivitas pelatihan dan penerapan keterampilan oleh lulusan
5. Mengoptimalkan peran penyuluh perikanan dalam membantu evaluasi pasca pelatihan di lapangan
6. Menganalisis hasil evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya
7. Melaksanakan pendampingan oleh penyuluh perikanan melalui identifikasi kebutuhan, pengisian instrumen evaluasi, dan penerapan hasil pelatihan.

#### **Indikator Kinerja Utama 2**

#### ***Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)***

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) yang telah mengikuti pelatihan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi: pelatihan diselenggarakan menggunakan anggaran APBN, peserta merupakan masyarakat (non-ASN), dan pelatihan dilaksanakan secara reguler baik secara tatap muka penuh (full offline) maupun daring penuh (full online). Selain itu, peserta hanya dihitung satu kali dalam tahun yang sama, kecuali jika mengikuti pelatihan dengan level kompetensi yang lebih tinggi. Perhitungan dilakukan secara akumulatif berdasarkan jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kriteria tersebut. IKU ini didukung anggaran dengan pagu Rp. 7.113.635.000,00 dan realisasi Rp.

9.411.400,00 dengan persentase capaian 3,03%. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih diperoleh dari data sub koordinator pelatihan dan capaian dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 5. capaian indikator Kinerja 2 Triwulan II Tahun 2025

<b>IKU 2-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi</b>								
Realisasi Triwulan II			2025			Renstra BPPP Banyuwangi		
2022	2023	2024	Targe t 2025	Realisas i 2025	% Capaia n	% Kenaikan 2024- 2025	Targe t 2025	% Capaian thd target 2025
3.109	3.453	5.765	300	300	100	-99,47	5.353	5,60

#### A. Capaian Tahun 2025

Capaian indikator ini hingga triwulan II Tahun 2025, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih di BPPP Banyuwangi tercatat sebanyak 300 orang, dari target triwulan II sebesar 300 orang. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan sudah sesuai dengan target triwulanan, namun masih dibutuhkan percepatan yang signifikan untuk mencapai sasaran target kinerja hingga akhir tahun.

#### B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Pada Triwulan II tahun 2025, jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi tercatat sebanyak 300 orang. Seluruh capaian ini berasal dari pelatihan di bidang pengolahan dan pemasaran ikan yang dilakukan secara daring, sementara pada bidang-bidang pelatihan lainnya belum terdapat realisasi. Tahun 2024 tercatat kinerja pelatihan tertinggi dengan 5.765 orang dilatih, namun, pada tahun 2025 capaian sementara hanya 300 orang yang jika dibandingkan dengan tahun 2024, menunjukkan penurunan drastis sebesar -99,47%. Penurunan ini menjadi sinyal penting bahwa terdapat kendala besar dalam pelaksanaan pelatihan tahun ini, baik dari sisi teknis, perencanaan, maupun dukungan sumber daya. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan Presiden terkait efisiensi anggaran, yang mengakibatkan pemblokiran anggaran perjalanan dinas—komponen biaya terbesar dalam penyelenggaraan pelatihan. Akibatnya, pelaksanaan pelatihan tatap muka menjadi sangat terbatas.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Hingga laporan ini disusun, dokumen Renstra BPPP Banyuwangi untuk periode 2025–2029 belum tersedia karena Renstra KKP sebagai acuan utama masih dalam proses penerbitan. Oleh karena itu, reviu terhadap Renstra BPPP Banyuwangi belum dapat dilakukan. Sebagai gantinya, perbandingan capaian kinerja tahun 2025 akan dilakukan dengan mengacu pada target yang tercantum dalam rancangan Indikator dan Target Kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2025-2029.

Pada Triwulan II tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil melatih sebanyak 300 orang masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam bidang pengolahan. Capaian ini menunjukkan pencapaian sebesar 5,60% dari target tahunan 2025 yang sebesar 5.353 orang. Meskipun capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan pelatihan tatap muka. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menyesuaikan strategi dalam memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra BPPP Banyuwangi setelah Renstra KKP terbit.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1.	BPPP Tegal	8530	10473	120
2.	BPPP Banyuwangi	300	300	100
3.	BPPP Ambon	60	69	115,00

Pada tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil mencapai target pelatihan

masyarakat kelautan dan perikanan secara penuh, dengan realisasi sebanyak 300 orang dari target 300 orang, sehingga mencatat capaian 100%. Meskipun jumlah target relatif lebih kecil dibandingkan UPT lain seperti BPPP Tegal dan BPPP Ambon, perbandingan ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berada pada posisi yang kompetitif di antara UPT Lingkup BPPSDM KP, meskipun capaian tahun 2025 masih memerlukan upaya lebih untuk memenuhi target yang lebih besar.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan dengan tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar.

D. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya manusia bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan oleh instruktur serta dibantu oleh penyuluh perikanan PNS dan PBB yang berada dilokasi pelatihan. Selain itu, metode pelatihan dilakukan secara daring berkontribusi terhadap efisiensi biaya yang dikeluarkan.

F. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya pelatihan Diversifikasi Poduk Olahan Perikanan yang dilakukan secara daring sehingga banyak peserta pelatihan yang dapat dijangkau hanya dengan 1 angkatan.

### **Indikator Kinerja Utama 3**

#### ***Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)***

IKU ini mengukur Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Kelautan dan Perikanan, yang merupakan pungutan yang dibayar oleh individu atau badan yang memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya serta hak yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini merupakan bagian dari pendapatan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Capaian PNBP Triwulan II Tahun 2025 diperoleh dari sumber aplikasi OM SPAN. Capaian tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 7. Indikator kinerja Triwulan II Tahun 2025

IKU 3-Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)								
Realisasi TW 2			2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	0,47	0,9	0,1	0,11	110	-87,78	0,78	14,10

A. Capaian tahun 2025

Capaian IKU PNBP hingga Triwulan II Tahun 2025 yang diperoleh BPPP Banyuwangi mencapai Rp0,11 miliar, dari target Triwulan II sebesar Rp0,1 miliar, sehingga menghasilkan capaian 110%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi target triwulanan, BPPP Banyuwangi telah melampaui ekspektasi.

B. Capaian Indikator Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Capaian nilai PNBP BPPP Banyuwangi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp0,9 miliar, sedangkan hingga Triwulan II tahun 2025 realisasinya baru mencapai Rp0,11 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar -87,78%. Penurunan ini menandakan bahwa kontribusi PNBP mengalami perlambatan cukup signifikan dan menjadi indikator penting untuk dilakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan yang diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra BPPP

Banyuwangi Pada Triwulan I Tahun 2025, target PNBP tahunan BPPP Banyuwangi yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp0,78 miliar. Dengan realisasi hingga Triwulan II sebesar Rp0,11 miliar, maka capaian terhadap target Renstra baru mencapai 14,10%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian triwulanan cukup baik, pencapaian secara keseluruhan terhadap target strategis masih rendah, sehingga perlu strategi intensif untuk meningkatkan kinerja PNBP pada semester kedua tahun 2025. Capaian yang lebih rendah dari target tahunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan penerimaan PNBP. Untuk memenuhi target tahunan, strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya dan optimalisasi penerimaan PNBP perlu dipertimbangkan pada

triwulan berikutnya, dengan fokus pada peningkatan jumlah layanan yang memberikan kontribusi langsung terhadap PNBPN sektor kelautan dan perikanan.

#### D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Nilai PNBPN Triwulan II Tahun 2025 dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1.	BPPP Tegal	6,45	14,26	120,00
2.	BPPP Banyuwangi	0,1	0,11	110,00
3.	BPPP Bitung	0,06	0,09	120,00
4.	BPPP Ambon	0,4	0,53	120,00
5.	BPPP Medan	0,02	0,04	120,00

Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDMKP menunjukkan kinerja yang baik dalam capaian nilai PNBPN. BPPP Banyuwangi mencatat capaian sebesar Rp0,11 miliar dari target Rp0,1 miliar, atau 110%, yang menunjukkan kinerja cukup baik dan melampaui target triwulanan. Jika dibandingkan dengan UPT lain, BPPP Tegal memiliki capaian tertinggi secara nominal dengan Rp14,26 miliar dari target Rp6,45 miliar (120%), sementara BPPP Ambon, Bitung, dan Medan juga mencatat capaian 120% dari target masing-masing, meskipun dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, BPPP Banyuwangi termasuk dalam kategori UPT yang efisien dalam pencapaian target, meskipun skala nilai PNBPN yang diperoleh masih tergolong kecil dibandingkan UPT yang memiliki potensi PNBPN lebih besar seperti Tegal dan Ambon. Capaian ini tetap menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi mampu mengelola potensi yang ada secara optimal dan dapat dijadikan dasar untuk peningkatan target PNBPN ke depan.

#### E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung

Keberhasilan perolehan PNBPN di BPPP Banyuwangi pada Triwulan II Tahun 2025, yang mencapai 120% dari target, sebagian besar diperoleh melalui pemanfaatan layanan yang diberikan serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu juga adanya komitmen pimpinan dengan penandatanganan kontrak kinerja PNBPN serta upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelatihan.

## F. Analisis Program / Faktor Pendukung

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya :

1. Penggunaan sarana dan prasarana
2. Penjualan peralatan dan mesin
3. Pemanfaatan sarana kolam bundar untuk budidaya ikan lele
4. Penghapusan atau penjualan kendaraan dan sarana lainnya yang tidak terpakai.

## G. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penunjang yang dilakukan untuk pencapaian kinerja ini adalah dengan melaksanakan penghapusan kendaraan dan sarana lainnya yang tidak terpakai

### **Sasaran Program 2**

#### ***Tersediannya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan***

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 2 IKU. Adapun dukungan anggaran untuk realisasi IKU berasal dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp 75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.0,00 dengan tingkat persentase 0%. dan capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut:

### **Indikator Kinerja Utama 5**

#### ***Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)***

IKU ini merupakan Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Banyuwangi. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja oleh satuan kerja BPPP Banyuwangi dengan formulasi penghitung jumlah sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. IKU ini didukung anggaran dengan pagu Rp. 25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0, 00 dengan persentase sebesar 0%. Penilaian IKU ini dilaksanakan di akhir tahun 2025. IKU ini berpotensi tidak tercapai pada tahun ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan 100% anggaran untuk prasarana diblokir.

### **Indikator Kinerja Utama 6**

#### ***Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)***

IKU ini merupakan IKU Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja BPPP Banyuwangi dengan formulasi penghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal. IKU ini juga didukung anggaran dengan pagu Rp. 50.000.000,- dan realisasi Rp.0,- dengan persentase sebesar 0%. IKU ini berpotensi tidak tercapai pada tahun ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan 100% anggaran untuk prasarana diblokir.

### **Sasaran Program 3**

#### ***Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan***

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 8 IKU dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.553.277.000,- dan realisasi Rp.49.167.237.443,00 dengan persentase sebesar 53,12%. Adapun capaian sasaran strategi tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja Utama 7**

#### ***Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)***

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. Nilai kinerja perencanaan anggaran di BPPP Banyuwangi pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. IKU ini didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi Rp. 6.157.063 dengan persentase sebesar 15,39 %. Guna mendukung pengukuran indikator ini telah terdapatnya SOP terkait penginputan aplikasi Smart DJA. Pada triwulan II telah dilaksanakan penginputan data pada aplikasi Smart DJA. Pengukuran pencapaian indikator ini dilaksanakan pada akhir periode 2025.

## Indikator Kinerja Utama 8

### Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)

IKU ini Merupakan indikator yang menunjukkan laporan yang mendukung kegiatan manajemen internal BPPP Banyuwangi. IKU ini didukung oleh anggaran dengan pagu Rp. 90.000.000,00 dan realisasi Rp.13.303.063 persentase sebesar 14,78 % dan Capaian indikator layanan dukungan manajemen internal triwulan II tahun 2025 data diperoleh dari Tim Kerja BPPP Banyuwangi sebanyak 52,73%, capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian indikator kinerja 12 Tahun 2025

IKU 8-Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi Triwulan II			2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi Tw II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	62,50	53,03	50	52,73	105,46	-0,56	100	52,73

#### A. Capaian Tahun 2025

Capaian kinerja IKU 8 pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 52,73%, melebihi target yang ditetapkan pada periode tersebut yaitu sebesar 50% sehinggatingkat pencapaiannya sebesar 105,46%.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 53,03%, maka capaian tahun 2025 sebesar 52,73% menunjukkan penurunan tipis sebesar -0,56%. Meskipun penurunan relatif kecil, hal ini tetap menjadi indikator untuk menjaga konsistensi kualitas layanan internal agar tidak terjadi penurunan yang lebih besar di triwulan berikutnya.

#### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi.

Dalam Renstra KKP 2025–2029, target tahunan untuk layanan dukungan manajemen internal di BPPP Banyuwangi ditetapkan sebesar 100%. Realisasi hingga Triwulan II sebesar 52,73% mencerminkan bahwa capaian berjalan seiring dengan proyeksi waktu pelaksanaan tahunan, dan berada pada jalur yang

memungkinkan target akhir tahun dapat tercapai jika performa saat ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada semester berikutnya.

#### D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Tegal	50	55	110,00
2	BPPP Banyuwangi	50	52,73	105,46
3	BPPP Bitung	50	50	100,00
4	BPPP Ambon	50	51,67	103,34
5	BPPP Medan	50	52,73	105,46

Hingga Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian layanan dukungan manajemen internal sebesar 52,73% dari target 50%, atau mencapai 105,46% terhadap target. Jika dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, capaian BPPP Banyuwangi tergolong tinggi. BPPP Tegal misalnya, mencapai 55% dari target yang sama, sehingga mencatat persentase capaian tertinggi yaitu 110%. Sementara itu, BPPP Ambon mencatat capaian 51,67% (103,34%), BPPP Medan juga mencatat 52,73% (105,46%), dan BPPP Bitung tepat pada target yaitu 50% (100%). Data ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berada di atas rata-rata capaian nasional UPT dan mampu menjaga konsistensi kualitas layanan dukungan internal, meskipun belum menjadi yang tertinggi. Kesetaraan capaian antara BPPP Banyuwangi dan BPPP Medan juga memperlihatkan bahwa keduanya memiliki kinerja manajemen internal yang stabil dan mendekati optimal.

#### E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian indikator ini dapat berhasil karena telah tersusunnya laporan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi yaitu

1. Dokumen Realisasi Keuangan sebanyak 6 dokumen
2. Laporan SPIP sebanyak 2 dokumen
3. Laporan survey kepuasan Masyarakat sebanyak 2 dokumen
4. Kertas kerja perencanaan sebanyak 1 dokumen

5. Laporan kinerja sebanyak 2 dokumen
  6. Laporan Tahunan 2024 sebanyak 1 dokumen
  7. Perjanjian Kinerja 1 dokumen
  8. Manual IKU sebanyak 1 dokumen
  9. Rencana aksi sebanyak 1 dokumen
  10. Matrik manajemen resiko sebanyak 1 dokumen
  11. Laporan BMN sebanyak 1 dokumen
  12. Laporan Keterbukaan Informasi Publik 1 dokumen
  13. Rekapitulasi Arsip 1 dokumen
  14. Printscreen aplikasi Smart DJA, kinerjaku, Emonev Bappenas, OMSPAN sebanyak 8 dokumen
- F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya Efisiensi sumberdaya
- Dalam pencapaian kinerja ini didukung oleh SDM BPPP Banyuwangi yang telah mengikutibimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi.
- G. Analisis Program / Faktor Pendukung Kinerja
- IKU ini dapat tercapai dengan melaksanakan penyusunan semua dokumen antara lain laporan penyusunan keuangan, BMN, SPIP, dan laporan kinerja, dokumen rencana aksi dan perjanjian kinerja dan laporan survey kepuasan masyarakat.

### **Indikator Kinerja Utama 9** ***Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)***

Profesionalitas adalah kualitas seseorang terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>. Capaian IP ASN Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja 9 Tahun 2025

IKU 9- Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (%)								
Realisasi TW II			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
83,16	75,05	76,90	70	76,56	109,37	-0,44	83	92,24

#### A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi mencapai 76,56%, melampaui target triwulanan sebesar 70%, dengan tingkat capaian mencapai 109,37%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas dan profesionalisme ASN di lingkungan BPPP Banyuwangi masih berada pada level yang baik, serta mampu memenuhi ekspektasi kinerja kelembagaan di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 yang mencatat indeks 76,90%, maka capaian pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar -0,44%. Meski penurunan ini tergolong sangat kecil, hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian dalam konteks menjaga tren peningkatan kualitas ASN. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, indeks tahun 2022 mencapai 83,16% dan tahun 2023 menurun ke 75,05%, sehingga capaian 2025 berada di antara capaian dua tahun terakhir, namun belum kembali menyamai angka tertinggi pada 2022.

#### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan target Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi pada tahun 2025 indeks profesionalitas ASN ditetapkan sebesar 83%. Dengan capaian sementara Triwulan II sebesar 76,56%, maka tingkat pencapaian terhadap target tahunan baru mencapai 92,24%. Artinya, meskipun target tahunan belum sepenuhnya tercapai, tren capaian menunjukkan bahwa target tahunan masih berpotensi untuk diraih apabila

dilakukan optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi ASN pada semester berikutnya.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	70	78,66	112,37
2	BPPP Banyuwangi	70	76,56	109,37
3	BPPP Bitung	70	82,21	117,44
4	BPPP Ambon	70	80,89	115,56
5	BPPP Medan	70	79,93	114,19

Pada tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76,56 dari target 70, atau mencapai 109,37% terhadap target. Capaian ini menandakan bahwa tingkat profesionalisme ASN di BPPP Banyuwangi berada dalam kategori sangat baik dan telah melebihi standar yang ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan UPT lain, posisi BPPP Banyuwangi berada di urutan kelima dari lima UPT, meskipun seluruh satuan kerja mencatat realisasi di atas target. BPPP Bitung menempati posisi tertinggi dengan 82,21 (117,44%), diikuti BPPP Ambon (80,89 atau 115,56%), BPPP Medan (79,93 atau 114,19%), dan BPPP Tegal (78,66 atau 112,37%).

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Mayoritas pegawai BPPP Banyuwangi secara aktif meningkatkan kompetensi secara mandiri ataupun penugasan melalui aplikasi EMILEA dan mengupload perolehan sertifikat ke dalam aplikasi MY ASN.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Terdapat efisiensi sumberdaya pada SDM dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah keterlibatan pegawai mengupload sertifikat pelatihan ke dalam aplikasi MY ASN

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Seluruh variabel komponen terhadap penilaian IPASN telah dipenuhi oleh seluruh

pegawai dalam mendukung keberhasilan indikator ini dengan mengikuti pelatihan secara mandiri ataupun penugasan dari BPPP Banyuwangi guna peningkatan profesionalisme SDM

### **Indikator Kinerja Utama 10**

#### ***Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)***

Berdasarkan jumlah rekomendasi hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KKP pada lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) oleh Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan II Tahun 2025 tidak ada temuan atau pun rekomendasi pada BPPP Banyuwangi sehingga persentasenya dianggap senilai 85%. Capaian IKU ini pada triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja 10 Tahun 2025

<b>IKU-10 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)</b>								
Realisasi TW II			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	85	85	100	-	85	100

#### A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebesar 85%, yang sesuai dengan target triwulanan sebesar 85%, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara efektif dan digunakan secara maksimal dalam perbaikan manajemen internal dan peningkatan kualitas layanan di BPPP Banyuwangi. Capaian ini menjadi indikator penting atas kesiapan satuan kerja dalam menyerap dan mengimplementasikan masukan dari proses pengawasan.

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 85% dengan capaian 100% terhadap target. Namun, karena data capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2022–2024) tidak terdapat target pada periode yang sama, maka perbandingan secara kuantitatif belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, capaian penuh pada tahun 2025 dapat dijadikan titik awal positif bagi pengukuran tren implementasi rekomendasi hasil pengawasan dalam tahun-tahun mendatang, sekaligus sebagai *baseline* untuk monitoring jangka panjang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi Target Renstra BPPP Banyuwangi 2025–2029 untuk indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, dan realisasi hingga Triwulan II telah mencapai 85% pula. Dengan demikian, capaian terhadap target mencapai 100%, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi telah berjalan secara fungsional, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

## D. Perbandingan Realisasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	85	85	100,00
2	BPPP Banyuwangi	85	85	100,00
3	BPPP Bitung	85	85	100,00
4	BPPP Ambon	85	85	100,00
5	BPPP Medan	85	85	100,00

Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja. BPPP Banyuwangi mencatat realisasi 85% dari target 85%, menghasilkan capaian 100%.

Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan, yang masing-masing mencatat realisasi 85% terhadap target 85%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja telah memiliki mekanisme yang kuat dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal secara tepat waktu dan tepat sasaran. Keseragaman capaian ini mengindikasikan adanya standar pelaksanaan pengawasan yang telah dipatuhi secara konsisten oleh seluruh UPT, termasuk BPPP Banyuwangi, sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas layanan publik.

#### E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam memanfaatkan 100% rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja menunjukkan bahwa terdapat sistem yang baik dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan. Faktor pendukung utama keberhasilan ini meliputi:

- 1) Respons cepat terhadap temuan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal (misalnya dari Itjen).
- 2) Adanya komitmen pimpinan dan tim kerja untuk menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi rutin dan dasar perbaikan sistem.
- 3) Dokumentasi dan pelaporan yang tertib, yang memudahkan pemantauan dan pengukuran efektivitas tindak lanjut.
- 4) Koordinasi lintas unit kerja yang berjalan efektif dalam mengimplementasikan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diterima.

#### F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Pemanfaatan hasil pengawasan secara penuh berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan adanya perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang menyoroti proses kerja yang berisiko pemborosan atau inefisiensi, serta implementasi rekomendasi memperkuat sistem pengendalian internal, yang secara langsung menekan potensi kesalahan, duplikasi kerja, dan inefisiensi anggaran.

#### G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Pemanfaatan rekomendasi pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dimaknai sebagai alat perbaikan manajemen program. Faktor keberhasilan pelaksanaan program yang berbasis rekomendasi pengawasan

dilakukan melalui:

1. Menerapkan sistem monitoring evaluasi berkala yang memastikan bahwa setiap rekomendasi yang masuk dikaji, dijadwalkan tindak lanjutnya, dan dilaporkan progresnya.
2. Membuka diri terhadap kritik dan audit sehingga rekomendasi tidak dianggap sebagai temuan semata, tetapi bagian dari proses peningkatan kinerja.
3. Menerapkan budaya kerja yang adaptif terhadap pembaruan prosedur, sehingga perbaikan sistem atau SOP dari hasil pengawasan bisa langsung diintegrasikan ke dalam aktivitas unit kerja.

### **Indikator Kinerja Utama 11** **Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi (nilai)**

IKU ini merupakan IKU Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PANDan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. IKU ini juga didukung anggaran dengan pagu sebesar dengan pagu anggaran pagu sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp 3.446.000,00 dengan persentase sebesar 0,11 %. Pengukuran indikator ini dilaksanakan di akhir periode. Pada triwulan II upaya yang telah dilakukan seperti mengumpulkan data dukung dan melakukan penginputan dokumen perencanaan kinerja pada aplikasi SAKIP meliputi RENSTRA, laporan kinerja, rencana aksi, SKP, perjanjian kinerja, serta dokumen perencanaan kinerja yang telah dipublikasi.

### **Indikator Kinerja Utama 12** **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)**

IKU ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker Pusat Pelatihan Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 didasarkan pada tujuh unsur dengan bobot nilai, yaitu: ketersediaan dokumen RKBMN 2026 (5%), pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL 2025 (7,5%),

usulan penetapan status penggunaan BMN hingga Triwulan III (25%), usulan pemindahtanganan/penghapusan BMN rusak berat (25%), penggunaan BMN hasil belanja modal 2024 disertai BAST/BAP (20%), penyusunan laporan BMN semesteran dan tahunan tepat waktu (12,5%), serta usulan RKBMN 2027 (5%). Total bobot keseluruhan mencapai 100%. Pada triwulan ini tidak ada target capaian.

### **Indikator Kinerja Utama 13**

#### ***Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)***

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 13 Tahun 2025

<b>IKU-13 <i>Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)</i></b>								
Realisasi TW II			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	80	100	120	-	80	100

## A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat capaian 100% dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian 120% terhadap target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang direncanakan telah diumumkan secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem yang ditentukan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

## C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Target Renstra BPPP Banyuwangi tahun 2025 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 80%, dan pada Triwulan II capaian telah mencapai 100%, atau 120% terhadap target. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan publikasi pengadaan telah dilakukan secara proaktif dan melebihi ekspektasi. Capaian ini mencerminkan kedisiplinan unit kerja dalam menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun anggaran, serta kesigapan dalam mengintegrasikan seluruh perencanaan ke dalam sistem SIRUP sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	100	120,00
2	BPPP Banyuwangi	80	100	120,00
3	BPPP Bitung	80	100	120,00
4	BPPP Ambon	80	100	120,00
5	BPPP Medan	80	100	120,00

Pada Triwulan II Tahun 2025, seluruh UPT lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Banyuwangi, menunjukkan capaian maksimal dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). BPPP Banyuwangi mencatat realisasi sebesar 100% dari target 80%, atau mencapai 120% capaian, sama seperti yang dicapai oleh BPPP Tegal, Bitung, Ambon, dan Medan. Keseragaman capaian ini menandakan bahwa seluruh UPT telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan pemerintah. Bagi BPPP Banyuwangi, capaian ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan dan kesiapan pengadaan sudah dilakukan dengan baik sejak awal tahun, sekaligus memperkuat posisi lembaga dalam penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik secara optimal.

E. Analisis Keberhasilan/Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% pengumuman RUP pada SIRUP dari target 80% (capaian 120%) menunjukkan penerapan manajemen pengadaan yang sangat baik. Faktor-faktor pendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya perencanaan awal tahun yang matang dan terintegrasi sehingga seluruh paket pengadaan telah teridentifikasi lebih awal.
2. Koordinasi erat antara perencana anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan tim pengadaan, yang memastikan semua kegiatan terinput dalam sistem tepat waktu.
3. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, serta pemahaman SDM terhadap prosedur dan regulasi pengadaan berbasis elektronik.
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala, yang mendorong disiplin waktu dalam pelaksanaan dan pelaporan.
5. Pemahaman regulasi LKPP dan sistem SIRUP yang memadai oleh tim pelaksana pengadaan.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi ini tampak dari tidak adanya keterlambatan dalam penginputan RUP, yang secara langsung mengurangi risiko terjadinya tender ulang, keterlambatan realisasi kegiatan, serta potensi pemborosan anggaran. Selain itu, proses dokumentasi pengadaan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi memungkinkan

penghematan waktu dan tenaga kerja administratif.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Keberhasilan program pengadaan tahun 2025, khususnya dalam aspek publikasi RUP, ditopang oleh beberapa program yaitu:

1. Mengikuti pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya terkait sistem pengadaan berbasis elektronik.
2. Pimpinan unit kerja ikut melakukan pengawasan yang menjadikan keterbukaan dalam pengadaan sebagai bagian dari budaya organisasi.

**Indikator Kinerja Utama 14**

***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)***

IKU Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai) merupakan salah satu IKU dalam Pencapaian sasaran strategis terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Banyuwangi. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah (satker). Nilai IKPA diberikan dalam bentuk angka persentase dan mencerminkan sejauh mana satker mampu melaksanakan anggaran secara efisien, tepat waktu, dan sesuai aturan. IKPA menjadi bagian penting dalam sistem evaluasi anggaran karena menunjukkan apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal untuk mencapai output dan hasil yang direncanakan. IKU ini berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. IKU ini didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,00 dan realisasi Rp. 6.157.063,00 dengan persentase sebesar 15,39%. Pencapaian indikator ini berdasarkan penginputan perencanaan pada aplikasi OMSPAN. Capaian indikator ini secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 14 Tahun 2025

IKU-14								
<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)</i>								
Realisasi TW II			2025				Rancangan Indikator dan Target Capaian BPPP Banyuwangi 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	84	99,76	118,76	-	92	108,43

#### A. Capaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2025 BPPP Banyuwangi mencatat nilai IKPA sebesar 99,76 dari target triwulan sebesar 84, menghasilkan persentase capaian sebesar 118,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di BPPP Banyuwangi berjalan dengan sangat baik, melampaui standar minimum yang ditetapkan. Nilai IKPA yang tinggi ini mengindikasikan kepatuhan terhadap aspek perencanaan anggaran, penyerapan tepat waktu, ketepatan penyampaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, hingga ketercapaian output kegiatan yang dibiayai oleh anggaran.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nilai IKPA pada periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada capaian karena dilakukan pengukuran di akhir tahun sehingga analisis tren dari tahun ke tahun tidak dapat dilakukan. Namun, capaian tahun 2025 yang sangat tinggi (99,76) dapat dijadikan sebagai baseline positif untuk mengevaluasi dan mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang. Hal ini juga menunjukkan bahwa satker telah melakukan perbaikan signifikan dibandingkan dengan perencanaan awal.

#### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan target Renstra tahun 2025, BPPP Banyuwangi menetapkan nilai IKPA sebesar 92, sementara capaian realisasi mencapai 99,76, yang berarti persentase capaian terhadap target renstra adalah 108,43%. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sesuai standar, tetapi juga melebihi ekspektasi strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan jangka

menengah. Capaian ini merupakan bentuk konkret dari peningkatan akuntabilitas fiskal, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

#### D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	84	99,76	118,76
2	BPPP Bitung	84	97,08	115,57
3	BPPP Ambon	84	99,84	118,86
4	BPPP Medan	84	100	119,05

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi meraih nilai IKPA sebesar 99,76, atau 118,76% terhadap target, yang menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat optimal, baik dari aspek perencanaan, realisasi, ketepatan waktu, maupun efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan UPT lain, capaian BPPP Banyuwangi termasuk dalam kategori tinggi dan kompetitif. BPPP Medan sedikit lebih unggul dengan nilai (119,05%), disusul oleh BPPP Ambon (99,84 atau 118,86%), dan BPPP Bitung dengan nilai 97,08 (115,57%). Dengan demikian, BPPP Banyuwangi berada di posisi ketiga tertinggi secara nasional dalam lingkup BPPSDM KP, dan menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola anggaran yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

#### E. Analisis Keberhasilan / Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian nilai IKPA BPPP Banyuwangi sebesar 99,76 pada Triwulan II Tahun 2025 atau 118,76% dari target menunjukkan pelaksanaan anggaran yang sangat optimal. Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor yaitu:

1. Adanya perencanaan anggaran yang disusun secara realistis dan berbasis kebutuhan, serta pelaksanaan kegiatan yang disiplin oleh setiap unit kerja.
2. Adanya pemantauan dan evaluasi anggaran secara berkala turut menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan memperbaiki deviasi sejak dini.

3. Adanya kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas koordinasi antara perencana, bendahara, dan pejabat komitmen turut mendorong kelancaran pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Tingginya nilai IKPA BPPP Banyuwangi juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari segi waktu, anggaran, maupun tenaga kerja. Penyerapan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan target output, menunjukkan tidak adanya pemborosan atau belanja yang tidak efektif. Pengelolaan keuangan yang tertib, termasuk ketepatan waktu pengajuan SPM dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), mengurangi potensi denda dan mempercepat realisasi belanja. Efisiensi administratif juga tercermin dari minimnya koreksi dokumen dan revisi DIPA, karena pelaksanaan anggaran telah didasarkan pada perencanaan yang akurat sejak awal tahun.

G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian IKPA ini tidak lepas dari beberapa faktor yaitu:

1. Pengelolaan kegiatan dan anggaran di BPPP Banyuwangi telah berjalan secara sinergis dan terukur.
2. Menyusun kegiatan perencanaan selaras dengan kalender pelaksanaan anggaran, memungkinkan realisasi belanja yang merata dan terhindar dari penumpukan di akhir tahun.
3. Memanfaatkan sistem digital seperti OM-SPAN, SAKTI, dan SMART secara maksimal telah mempercepat proses verifikasi dan pelaporan, serta meningkatkan akurasi data realisasi yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan.

#### **Sasaran Program 4**

##### *Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan*

Pada Sasaran strategis ini, pencapaiannya didukung dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan jumlah IKU pendukung sebanyak 4 IKU dan dukungan anggaran dari BPPP Banyuwangi dengan pagu sebesar Rp. 4,880,012,000 dan realisasi sebesar Rp. 2.885.934.414,00 dengan persentase sebesar 59,13%. Adapun capaian sasaran strategis tersebut dapat diraih dari indikator sebagai berikut :

## Indikator Kinerja Utama 5

### **Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (kelompok)**

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang telah mendapatkan penyuluhan dari penyuluh perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan meliputi pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses permodalan, akses pasar, akses informasi dan teknologi, pembinaan UMKM dan koperasi, serta pendampingan kepada kelompok penerima bantuan. Perhitungan IKU ini didasarkan pada jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah disuluh. Pencapaian IKU Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh pada Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)

IKU 15-Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)								
Realisasi TW II			2025				Renstra KKP 2025 - 2029	
2022	2023	2024	Target TW II 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2.744	2.577	3.652	1.800	1.900	105,56	-47,97	5996	31,68

#### A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah disuluh oleh BPPP Banyuwangi mencapai 1.900 kelompok, melebihi target triwulan sebesar 1.800 kelompok dengan persentase capaian sebesar 105,56%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang positif dalam pelaksanaan penyuluhan, yang tetap terlaksana secara optimal hingga pertengahan tahun, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya di lapangan.

#### B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah kelompok yang disuluh menurun dari 3.652 menjadi 1.900, sehingga terdapat penurunan sebesar -47,97%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran, pergeseran fokus program, rasionalisasi

kegiatan, atau adanya perbedaan pola pelaksanaan penyuluhan yang lebih selektif dan berkualitas. Walaupun terdapat penurunan kuantitatif, capaian terhadap target tetap terjaga baik.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan Renstra 2025–2029, target tahunan jumlah kelompok yang disuluh oleh BPPP Banyuwangi adalah 5.996 kelompok. Dengan realisasi semester I sebesar 1.900 kelompok, capaian terhadap target tahunan baru mencapai 31,68%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan masih perlu ditingkatkan secara signifikan pada semester II untuk mencapai target Renstra. Diperlukan strategi percepatan program penyuluhan, kolaborasi antar penyuluh, serta perluasan cakupan wilayah binaan untuk mengejar sisa target di paruh kedua tahun anggaran.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1.	BPPP Tegal	50	50	100,00
2.	BPPP Banyuwangi	1800	1900	105,56
3.	BPPP Bitung	300	320	106,67
4.	BPPP Ambon	1000	1100	110,00
5.	BPPP Medan	1650	1938	117,45

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat realisasi penyuluhan terhadap 1.900 kelompok dari target 1.800, sehingga mencapai 105,56% dari target. Jika dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, capaian BPPP Banyuwangi termasuk dalam kategori cukup tinggi, meskipun tidak menjadi yang tertinggi secara nasional. BPPP Medan mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 1.938 kelompok atau 117,45% dari target, disusul oleh BPPP Ambon dengan capaian 110%, dan BPPP Bitung dengan 106,67%. Sementara itu, BPPP Tegal mencapai 100% sesuai targetnya. BPPP Banyuwangi tetap termasuk salah satu satker dengan cakupan penyuluhan terbesar. Tingginya target dan realisasi menunjukkan peran strategis

Banyuwangi sebagai sentra pelatihan dan penyuluhan, khususnya di wilayah selatan dan timur Indonesia..

#### E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Capaian realisasi sebesar 1.900 kelompok atau 105,56% dari target menunjukkan bahwa program penyuluhan telah berjalan dengan efektif. Keberhasilan ini ditunjang oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

1. Adanya peluang lebih besar untuk menjangkau kelompok sasaran di berbagai kecamatan pesisir.
2. Kapasitas dan pengalaman SDM penyuluh dalam melaksanakan metode pendekatan partisipatif yang tepat sasaran dan komunikatif.
3. Adanya kolaborasi lintas sektor dengan instansi daerah, koperasi, dan pelaku usaha lokal yang memperkuat jaringan kegiatan penyuluhan.
4. Pemanfaatan teknologi dalam penyuluhan, seperti media visual, daring, atau hybrid, yang membantu menjangkau kelompok dalam jumlah lebih besar tanpa mengorbankan kualitas materi.
5. Adanya dukungan dan arahan dari pimpinan unit kerja, yang memastikan pelaksanaan program penyuluhan berjalan terstruktur dan sesuai jadwal.
6. Adanya monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evaluasi kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya

#### F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja dan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

## G. Analisis Program / Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukannya pendampingan terhadap kelompok binaannya seperti pendampingan dalam bantuan modal, bantuan pemerintah, pendampingan dalam kemitraan / pasar, pendampingan penginputan atau pendaftaran KUSUKA, pendampingan penilaian kelas kelompok dan peningkatan kelas kelompok.

### Indikator Kinerja Utama 16

#### ***Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)***

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya di Satker BPPP Banyuwangi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, dengan formula perhitungan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai Kepmen KP No. 14 Tahun 2012. Capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi Tahun 2025 diperoleh dari sumber Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi serta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Capaian indikator Kinerja 16 Tahun 2025

<b>IKU 16-Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)</b>								
Realisasi Triwulan II			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW II 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	51	20	20	100	-60,78	216	9,25

#### A. Capaian Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil meningkatkan kelas sebanyak 20 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP, sesuai dengan target triwulan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat capaian 100%, yang berarti

seluruh rencana peningkatan kelas kelompok untuk semester pertama tahun ini telah dilaksanakan sesuai jadwal.

B. Perbandingan Capaian dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebanyak 51 kelompok, maka terjadi penurunan jumlah kelompok yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2025 sebesar 60,78%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan skala prioritas, atau pendekatan pendampingan yang lebih mendalam namun dengan jumlah kelompok yang lebih terbatas. Meskipun demikian, keberhasilan mencapai target triwulan tetap merupakan sinyal positif bahwa kegiatan berjalan sesuai perencanaan operasional.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Berdasarkan target Renstra tahun 2025, jumlah kelompok yang harus ditingkatkan kelasnya adalah 216 kelompok. Dengan realisasi baru 20 kelompok, maka capaian terhadap target tahunan baru mencapai 9,25%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target triwulan tercapai 100%, pencapaian terhadap target tahunan masih sangat rendah. Diperlukan upaya percepatan dan strategi intensifikasi pada semester berikutnya, termasuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mempercepat asesmen awal kelompok, dan memperkuat dokumentasi hasil peningkatan kelas untuk mencapai target tahunan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Banyuwangi	20	20	100,00
2	BPPP Bitung	10	11	110,00
3	BPPP Ambon	6	6	100,00
4	BPPP Medan	10	12	120,00

Pada triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi mencatat peningkatan kelas bagi

20 kelompok, atau 100% capaian terhadap target triwulannya. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kelompok sasaran telah berhasil melalui proses pembinaan yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok. Jika dibandingkan dengan UPT lain di lingkup BPPSDM KP, capaian BPPP Banyuwangi tergolong baik dan tepat sasaran, meskipun tidak mencatat peningkatan di atas target seperti beberapa satker lainnya. BPPP Medan mencatat capaian tertinggi dengan 120% (12 kelompok dari target 10), disusul BPPP Bitung dengan 110%, sementara BPPP Ambon juga mencatat capaian 100%, setara dengan Banyuwangi.

E. Analisis Keberhasilan / Faktor Penunjang Keberhasilan

Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan melakukan evaluasi kinerja penyuluh melalui laporan kegiatan penyuluhan yang disertakan dengan data dukung dan SKP beserta dokumennya

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerjadan BOP penyuluh PNS dan Honor serta BOP PPB dapat terealisasi secara optimal dengan terpenuhinya target kinerja yang telah ditentukan
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.
3. Program dilakukan berbasis data dan kebutuhan, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menghabiskan sumber daya secara sia-sia. Dalam banyak kasus, penyuluhan peningkatan kelas dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan teknis lainnya, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi penyuluh

G. Analisis Program/Faktor Keberhasilan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan dilakukannya penilaian kelas kelompok sehingga diperoleh skor penilaian yang akan menentukan naik tidaknya kelas kelompok. Peningkatan kelas kelompok naik dimulai dari pemula ke madya dan madya ke utama.

## Indikator Kinerja Utama 17

### ***Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)***

IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satker BPPP Banyuwangi merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan formula perhitungan Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok. Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok) sumber data diperoleh dari Tim Kerja Penyuluhan BPPP Banyuwangi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja 17 Tahun 2025

<b>IKU 17-Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)</b>								
Realisasi Tw 1			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW II 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
249	370	70	134	165	120	135,71	791	15,17

#### A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil membentuk 165 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP, melampaui target triwulan sebesar 134 kelompok, sehingga capaian mencapai 120%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program pembentukan kelompok berjalan sangat baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam bentuk kelembagaan ekonomi dan sosial yang lebih terstruktur.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) yang hanya mencatat 70 kelompok baru, capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 165 kelompok atau tercapai 135,71%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembentukan

kelompok pada tahun ini mendapatkan respons positif dari masyarakat serta adanya strategi pendampingan yang lebih terarah dan aktif dari penyuluh..

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi  
Meskipun capaian triwulan II sangat baik, dibandingkan dengan target tahunan dalam Renstra sebesar 791 kelompok, capaian semester ini baru menyumbang 15,17% dari target tahunan. Dengan demikian, perlu ada upaya percepatan pembentukan kelompok baru pada semester berikutnya, baik melalui sinergi lintas program, peningkatan intensitas sosialisasi, maupun penguatan dukungan dari pemangku kepentingan lokal untuk memobilisasi pembentukan kelompok baru yang sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standart nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 24. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1.	BPPP Banyuwangi	134	165	120,00
2.	BPPP Bitung	50	50	100,00
3.	BPPP Ambon	18	40	120,00
4.	BPPP Medan	160	192	120,00

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil membentuk 165 kelompok baru, dari target 134 kelompok, sehingga mencapai 120% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung pembentukan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha KP, sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan nelayan. Jika dibandingkan dengan UPT lain, capaian BPPP Banyuwangi setara dengan BPPP Ambon dan BPPP Medan, yang juga mencapai 120% dari target mereka masing-masing. BPPP Ambon membentuk 40 kelompok dari target 18, sedangkan BPPP Medan membentuk 192 kelompok dari target 160. BPPP Bitung mencatat capaian 100% (50 kelompok dari target 50), yang tetap menunjukkan kinerja baik meskipun tidak melampaui target.

E. Analisis Keberhasilan/ Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pembentukan 165 kelompok atau 120% capaian terhadap target triwulan menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Faktor pendukung utamanya antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.
5. Kesadaran Pelaku utama/ Pelaku usaha KP tentang pentingnya membentuk kelompok terkait kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan, pemodal usaha dan kegiatan pelatihan

F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Capaian yang tinggi dapat dicapai dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun tenaga pendamping. Beberapa bentuk efisiensi yang tampak adalah:

1. Integrasi kegiatan pembentukan kelompok dengan program lainnya, seperti pelatihan atau pendampingan budidaya, sehingga pelaksanaannya hemat biaya dan waktu.
2. Pemanfaatan tenaga penyuluh lokal dan jejaring kelompok eksisting yang membantu memfasilitasi terbentuknya kelompok baru tanpa biaya tambahan.
3. Digitalisasi pelaporan dan koordinasi memungkinkan pemantauan pembentukan kelompok dilakukan lebih cepat dan efisien.
4. Adanya efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan penumbuhan kelompok yaitu aparat desa (lurah) , pelaku utama/usaha perikanan, dan penyuluh

#### G. Analisis Program/faktor keberhasilan

Dari sisi program, keberhasilan ini juga ditopang oleh desain kegiatan yang selaras dengan arah Renstra BPPP Banyuwangi dan kebijakan KKP, yang menargetkan penguatan kelembagaan masyarakat KP. Faktor keberhasilan lainnya mencakup:

1. Penyesuaian metode pembentukan kelompok dengan karakteristik lokal, sehingga program lebih diterima oleh masyarakat sasaran.
2. Ketersediaan format baku dan SOP pembentukan kelompok, yang memudahkan proses administrasi dan legalisasi kelompok baru.
3. Ketersediaan insentif tidak langsung, seperti peluang menerima bantuan atau mengikuti pelatihan, yang mendorong masyarakat membentuk kelompok secara sukarela.
4. Pendampingan pasca-pembentukan, yang menunjukkan bahwa kelompok tidak hanya dibentuk untuk memenuhi target, tetapi juga diarahkan agar berkelanjutan dan produktif.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.

#### **Indikator Kinerja Utama 18**

#### ***Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi***

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP No 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Formula perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang mendapatkan pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan.

Tabel 25. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi

<b><i>Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi</i></b>								
Realisasi TW II			2025				Renstra KKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	Target TW II 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	6	6	100	-	44	13,63

A. Capaian Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi telah berhasil melakukan pendampingan terhadap 6 gabungan kelompok, koperasi, atau korporasi, sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan yaitu 6 kelompok. Hal ini menghasilkan capaian 100%, yang mencerminkan terlaksananya program pendampingan kelembagaan ekonomi secara optimal sesuai jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan awal tahun.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator ini merupakan IKU baru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya (2022–2024).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPPP Banyuwangi

Jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 dalam Renstra, yaitu 44 unit gabungan kelompok/koperasi/korporasi, maka capaian pada Triwulan I sebesar 6 unit baru mencapai 13,63% dari target tahunan. Artinya, meskipun capaian triwulanan sudah sesuai target, diperlukan akselerasi pendampingan pada triwulan-triwulan berikutnya untuk memastikan target tahunan terpenuhi. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas program, memperluas wilayah sasaran, serta memperkuat peran penyuluh dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan lembaga yang potensial untuk didampingi secara lebih intensif.

D. Perbandingan Realisasi dengan UPT Lingkup BPPSDMKP

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena

belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sesuai, maka perbandingan dilakukan dengan UPT Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi *Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi* dengan UPT Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	6	6	100,00
2	BPPP Bitung	7	8	114,29
3	BPPP Ambon	5	6	120,00
4	BPPP Medan	10	12	120,00

Pada Triwulan II Tahun 2025, BPPP Banyuwangi berhasil mendampingi 6 gabungan kelompok/koperasi/korporasi, sesuai target yang ditetapkan, sehingga mencapai 100% capaian. Capaian ini menunjukkan bahwa program berjalan tepat sasaran dan sesuai rencana, meskipun belum melampaui target seperti beberapa UPT lainnya. Dibandingkan dengan UPT lain, capaian BPPP Banyuwangi masih kompetitif, meskipun tidak melebihi target. BPPP Bitung mencatat realisasi 8 dari target 7 unit (114,29%), sementara BPPP Ambon dan BPPP Medan sama-sama mencatat capaian 120%, dengan realisasi 6 dan 12 unit masing-masing dari target 5 dan 10.

#### E. Analisis Keberhasilan/Faktor Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan BPPP Banyuwangi dalam mencapai 100% target pendampingan kelembagaan ekonomi masyarakat KP pada Triwulan II 2025 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya pemanfaatan basis data kelembagaan eksisting, seperti koperasi nelayan, korporasi perikanan budidaya, dan gabungan kelompok usaha (Gapokkan), yang telah teridentifikasi dan siap didampingi. Kedua, ketersediaan penyuluh dan fasilitator yang memahami pendekatan kelembagaan dan bisnis, menjadi motor penggerak dalam mendorong lembaga tersebut menuju arah penguatan kapasitas manajemen dan usaha. Ketiga, dukungan lintas sektor, baik dari Dinas KP daerah, koperasi, maupun mitra usaha, mempercepat intervensi dalam bentuk pelatihan, fasilitasi legalitas, atau akses pemasaran. Keempat, adanya komitmen internal manajemen satker dalam menjadikan penguatan kelembagaan ekonomi sebagai program prioritas di awal tahun.

## F. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Keberhasilan pembentukan 165 kelompok atau 120% capaian terhadap target triwulan menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi berhasil menjalankan program ini secara efektif. Faktor pendukung utamanya antara lain:

1. Ketersediaan basis data masyarakat sasaran yang telah dipetakan lebih awal, memudahkan proses identifikasi dan mobilisasi pembentukan kelompok.
2. Pendekatan partisipatif penyuluh yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses pembentukan, menciptakan rasa kepemilikan di tingkat akar rumput.
3. Adanya sinergi dengan program lain seperti pelatihan, bantuan sarana, dan fasilitasi pemasaran yang memperkuat minat masyarakat untuk membentuk kelompok formal.
4. Komitmen manajemen dan dukungan lintas sektor, seperti Dinas KP daerah dan lembaga pendukung usaha, yang mempercepat proses legalisasi dan pengorganisasian kelompok.

## G. Analisis Program /faktor keberhasilan

Secara umum, keberhasilan capaian program di Triwulan II Tahun 2025 pada BPPP Banyuwangi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang terarah serta pelaksanaan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Beberapa faktor penunjang keberhasilan meliputi:

- (1) pemanfaatan aset yang optimal untuk mendukung layanan;
- (2) Koordinasi yang baik dengan UPT lain, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan
- (3) melakukan komitmen manajemen untuk mencapai target kinerja melalui monitoring dan evaluasi yang rutin.

### **Sasaran Program 4**

#### ***Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan***

Sasaran program Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan

perikanan yang bertumpu pada penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat. IKU ini baru terbentuk di triwulan ini dan terdiri dari 1 IKU yaitu Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket).

### **Indikator Kinerja Utama 19**

#### ***Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)***

Indikator ini mengukur jumlah media penyuluhan yang disusun dan disebarluaskan oleh Satker BPPP Banyuwangi dalam bentuk paket yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Media ini bisa berupa Leaflet / brosur, buku saku penyuluhan, infografis cetak maupun digital, video tutorial penyuluhan, modul interaktif atau presentasi digital, media audio (podcast, radio penyuluhan). IKU ini baru terbentuk pada triwulan ini dan merupakan IKU baru. IKU ini juga baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2025.

### **Sasaran Program 5**

#### ***Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan***

### **Indikator Kinerja Utama 20**

#### ***Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi***

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025. Pada triwulan ini tidak ada target capaian untuk IKU ini karena baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV tahun 2025. Metode perhitungan capaian IKU ini yaitu:

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

### **3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025**

Berdasarkan rekapitulasi SAKTI Tahun 2025 pada tanggal 30 Juni 2025 pagu anggaran BPPP Banyuwangi sebesar Rp.104.785.524.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 52.150.181.950,00 dengan persentase capaian 49,76%. Secara umum anggaran BPPP Banyuwangi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja dan tercapai dengan baik.

### **3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPP Banyuwangi**

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing cost), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA. Realisasi anggaran pada masing-masing IKU BPPP Banyuwangi sebagaimana pada lampiran.

## BAB IV

# Penutup

1. Capaian Kinerja Utama
2. Permasalahan dan Rekomendasi

#### 4.1. Capaian Kinerja Utama

BPPP Banyuwangi pada Tahun 2025 memiliki tanggung jawab 5 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama, dengan 4 IK berstatus biru, dan 8 IK berstatus hijau.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi di tingkat korporat Tahun 2025 sebesar **106,58%**.

Tabel 27. Capaian Kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan II Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
<b>I. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Banyuwangi (Orang)	3,763	70	70	100
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5,353	300	300	100
3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,78	0,10	0,11	110
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	120	-	-	-
<b>II. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>					
5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-
6	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
<b>III. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b>					
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	71,5	-	-	-
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	50	52,73	105,46
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	83	70	76,56	109,37
10	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	85	85	85	100
11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	80	-	-	-
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Banyuwangi (%)	80	-	-	-
13	"Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Banyuwangi (%)"	80	80	100	120
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	84	99,76	118,76
<b>IV. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
15	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Banyuwangi	5.996	1.800	1.900	105,56
16	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Banyuwangi	216	20	20	100
17	Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Banyuwangi (kelompok)	791	25	30	120
18	Gabungan Kelompok /	44	3	3	100

No.	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Capaian (%)
	Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Banyuwangi (unit)				
V. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan					
19	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Banyuwangi (Paket)	1	-	-	-
VI. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
20	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Banyuwangi	15	-	-	-

#### 4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

1. Secara umum kinerja BPPP Banyuwangi cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian dalam pengumpulan data dukung karena masih ditemukannya data yang duplikat dan data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka hal yang harus dilakukan yaitu melakukan verifikasi data secara teratur dan teliti sehingga capaian sesuai dengan data dukung yang ada.
2. Pencapaian indikator kinerja PNBPN telah dilaksanakan forum komunikasi publik dengan harapan dapat meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Banyuwangi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Banyuwangi. Akhirnya, BPPP Banyuwangi berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

# LAMPIRAN

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian** : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi** : 12 **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja** : 238762 **BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>95,908,525,000</b>	<b>0</b>	<b>38,848,258,205</b>	<b>13,301,923,745</b>	<b>52,150,181,950</b>	<b>54.37 %</b>	<b>43,758,343,050</b>
DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,258,185,000	0	2,482,454,950	487,186,494	2,969,641,444	56.48 %	2,288,543,556
DL.2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan	394,319,000	0	79,437,030	4,270,000	83,707,030	21.23 %	310,611,970
DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
DCC.431 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101 Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM KP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101.JA Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM KP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	83,809,000	0	74,295,630	0	74,295,630	88.65 %	9,513,370
QDB.641 Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan	83,809,000	0	74,295,630	0	74,295,630	88.65 %	9,513,370
410 Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV)	83,809,000	0	74,295,630	0	74,295,630	88.65 %	9,513,370
410.JA Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas Smart Fisheries Village (SFV)	83,809,000	0	74,295,630	0	74,295,630	88.65 %	9,513,370
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	74,300,000	0	74,295,630	0	74,295,630	99.99 %	4,370
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,509,000	0	0	0	0	0.00 %	9,509,000
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
RAL.711 Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101 Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101.ZA Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0.00 %	0
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
RBQ.721 Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101 Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
101.ZB Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	310,510,000	0	5,141,400	4,270,000	9,411,400	3.03 %	301,098,600
SCC.831 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	310,510,000	0	5,141,400	4,270,000	9,411,400	3.03 %	301,098,600
102 Pelatihan Masyarakat Berbasis "online Training/Blended"	310,510,000	0	5,141,400	4,270,000	9,411,400	3.03 %	301,098,600
102.JA BIMTEK Bagi Masyarakat KP Model Blended On Line	306,835,000	0	5,141,400	4,270,000	9,411,400	3.07 %	297,423,600
521211 Belanja Bahan	283,166,000	0	0	0	0	0.00 %	283,166,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,669,000	0	5,141,400	4,270,000	9,411,400	39.76 %	14,257,600
102.ZC BIMTEK Bagi Masyarakat KP Model Blended On Line	3,675,000	0	0	0	0	0.00 %	3,675,000
521211 Belanja Bahan	3,675,000	0	0	0	0	0.00 %	3,675,000
522141 Belanja Sewa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103 Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103.JA Pelatihan Keterampilan Keselamatan Dasar Tingkat 1 (BST 1) PNBP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103.JB Pelatihan Keterampilan Keselamatan Dasar Tingkat 2 (BST 2) PNBP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103.JC Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan PNBP (Upgrading)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103.JD Diklat Teknis Perikanan PNB	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
103.JE Penyelenggaraan Ujian AN/ATKAPIN II (PNBP)	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
DL.7020 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4,863,866,000	0	2,403,017,920	482,916,494	2,885,934,414	59.33 %	1,977,931,586
<b>QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>	<b>4,863,866,000</b>	<b>0</b>	<b>2,403,017,920</b>	<b>482,916,494</b>	<b>2,885,934,414</b>	<b>59.33 %</b>	<b>1,977,931,586</b>
<b>QDD.646 Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan</b>	<b>4,863,866,000</b>	<b>0</b>	<b>2,403,017,920</b>	<b>482,916,494</b>	<b>2,885,934,414</b>	<b>59.33 %</b>	<b>1,977,931,586</b>
<b>202 Pendampingan kepada Kelompok Masyarakat KP</b>	<b>4,863,866,000</b>	<b>0</b>	<b>2,403,017,920</b>	<b>482,916,494</b>	<b>2,885,934,414</b>	<b>59.33 %</b>	<b>1,977,931,586</b>
202.JA Pembayaran BOP Penyuluh Perikanan PNS dan PPPK	4,863,866,000	0	2,403,017,920	482,916,494	2,885,934,414	59.33 %	1,977,931,586
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	4,863,866,000	0	2,403,017,920	482,916,494	2,885,934,414	59.33 %	1,977,931,586
202.JB Koordinasi Penyuluhan KP	0	0	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0	0	0.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	90,650,340,000	0	36,365,803,255	12,814,737,251	49,180,540,506	54.25 %	41,469,799,494
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan			36,365,803,255	12,814,737,251			
WA.2378 Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90,650,340,000	0	36,365,803,255	12,814,737,251	49,180,540,506	54.25 %	41,469,799,494
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>90,608,095,000</b>	<b>0</b>	<b>36,352,500,192</b>	<b>12,814,737,251</b>	<b>49,167,237,443</b>	<b>54.26 %</b>	<b>41,440,857,557</b>
<b>EBA.962 Layanan Umum</b>	<b>26,850,000</b>	<b>0</b>	<b>20,325,500</b>	<b>0</b>	<b>20,325,500</b>	<b>75.70 %</b>	<b>6,524,500</b>
<b>403 Pelayanan Umum Unit Kerja Pelatihan Kelautan dan Perikanan</b>	<b>26,850,000</b>	<b>0</b>	<b>20,325,500</b>	<b>0</b>	<b>20,325,500</b>	<b>75.70 %</b>	<b>6,524,500</b>
403.JA Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan	26,850,000	0	20,325,500	0	20,325,500	75.70 %	6,524,500
521211 Belanja Bahan	3,275,000	0	2,525,000	0	2,525,000	77.10 %	750,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,925,000	0	2,026,000	0	2,026,000	69.26 %	899,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,350,000	0	15,474,500	0	15,474,500	76.04 %	4,875,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
403.ZE Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtangaan Pelatihan dan Penyuluhan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521211 Belanja Bahan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>90,581,245,000</b>	<b>0</b>	<b>36,332,174,692</b>	<b>12,814,737,251</b>	<b>49,146,911,943</b>	<b>54.26 %</b>	<b>41,434,333,057</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>87,293,277,000</b>	<b>0</b>	<b>34,939,114,744</b>	<b>12,634,270,673</b>	<b>47,573,385,417</b>	<b>54.50 %</b>	<b>39,719,891,583</b>
001.DA Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	61,444,397,000	0	24,519,146,098	9,012,520,049	33,531,666,147	54.57 %	27,912,730,853
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	18,663,031,000	0	8,692,493,100	2,861,055,500	11,553,548,600	61.91 %	7,109,482,400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	281,000	0	113,695	39,165	152,860	54.40 %	128,140
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,587,691,000	0	688,423,940	227,776,930	916,200,870	57.71 %	671,490,130
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	459,778,000	0	199,072,206	66,298,188	265,370,394	57.72 %	194,407,606
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,954,300,000	0	1,718,830,000	565,320,000	2,284,150,000	57.76 %	1,670,150,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	261,085,000	0	122,906,893	103,957,665	226,864,558	86.89 %	34,220,442
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	1,148,726,000	0	491,007,600	162,293,220	653,300,820	56.87 %	495,425,180
511129 Belanja Uang Makan PNS	3,833,280,000	0	1,044,994,000	230,490,000	1,275,484,000	33.27 %	2,557,796,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	7,770,000	0	2,040,000	370,000	2,410,000	31.02 %	5,360,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	31,528,455,000	0	11,559,264,664	4,794,919,381	16,354,184,045	51.87 %	15,174,270,955
001.DB Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	14,849,215,000	0	6,144,427,066	2,177,600,286	8,322,027,352	56.04 %	6,527,187,648
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	5,217,260,000	0	2,328,863,365	776,704,000	3,105,567,365	59.52 %	2,111,692,635
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124,000	0	40,380	11,936	52,316	42.19 %	71,684
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	358,855,000	0	166,321,919	55,474,320	221,796,239	61.81 %	137,058,761
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	103,163,000	0	48,463,712	16,250,968	64,714,680	62.73 %	38,448,320
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	803,880,000	0	370,260,000	123,480,000	493,740,000	61.42 %	310,140,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	311,261,000	0	145,835,775	48,738,660	194,574,435	62.51 %	116,686,565
511628 Belanja Uang Makan PPPK	1,085,040,000	0	327,945,000	74,846,000	402,791,000	37.12 %	682,249,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,969,632,000	0	2,756,696,915	1,082,094,402	3,838,791,317	55.08 %	3,130,840,683

**\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

**\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.JA Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	10,734,860,000	0	4,175,071,448	1,407,957,942	5,583,029,390	52.01 %	5,151,830,610
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,979,650,000	0	1,579,517,900	500,536,100	2,080,054,000	52.27 %	1,899,596,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	57,000	0	20,041	6,896	26,937	47.26 %	30,063
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	291,450,000	0	124,296,720	38,762,490	163,059,210	55.95 %	128,390,790
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	77,272,000	0	33,542,464	11,146,298	44,688,762	57.83 %	32,583,238
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0	10,800,000	3,600,000	14,400,000	57.14 %	10,800,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	381,052,000	0	168,548,000	50,096,000	218,644,000	57.38 %	162,408,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	45,953,000	0	21,487,020	16,104,432	37,591,452	81.80 %	8,361,548
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	191,623,000	0	81,979,440	26,578,140	108,557,580	56.65 %	83,065,420
511129 Belanja Uang Makan PNS	651,024,000	0	161,093,000	35,935,000	197,028,000	30.26 %	453,996,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	84,910,000	0	35,875,000	11,410,000	47,285,000	55.69 %	37,625,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,006,669,000	0	1,957,911,863	713,782,586	2,671,694,449	53.36 %	2,334,974,551
001.JB Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	264,805,000	0	100,470,132	36,192,396	136,662,528	51.61 %	128,142,472
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	89,700,000	0	38,443,200	12,814,400	51,257,600	57.14 %	38,442,400
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	871	251	1,122	37.40 %	1,878
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,485,000	0	1,922,160	640,720	2,562,880	57.14 %	1,922,120
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,794,000	0	768,864	256,288	1,025,152	57.14 %	768,848
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,120,000	0	6,480,000	2,160,000	8,640,000	57.14 %	6,480,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,069,000	0	2,172,600	724,200	2,896,800	57.15 %	2,172,200
511628 Belanja Uang Makan PPPK	19,536,000	0	4,514,000	999,000	5,513,000	28.22 %	14,023,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	129,098,000	0	46,168,437	18,597,537	64,765,974	50.17 %	64,332,026
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>3,287,968,000</b>	<b>0</b>	<b>1,393,059,948</b>	<b>180,466,578</b>	<b>1,573,526,526</b>	<b>47.86 %</b>	<b>1,714,441,474</b>
002.JA PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	527,913,000	0	233,582,740	40,574,400	274,157,140	51.93 %	253,755,860
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	192,417,000	0	75,237,600	16,059,400	91,297,000	47.45 %	101,120,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	194,880,000	0	64,010,000	15,940,000	79,950,000	41.03 %	114,930,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	89,016,000	0	89,015,140	0	89,015,140	100.00	860

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya	51,600,000	0	5,320,000	8,575,000	13,895,000	26.93 %	37,705,000
002.JB KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	96,880,000	0	71,104,615	10,257,371	81,361,986	83.98 %	15,518,014
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	82,880,000	0	66,068,625	9,766,371	75,834,996	91.50 %	7,045,004
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	14,000,000	0	5,035,990	491,000	5,526,990	39.48 %	8,473,010
002.JC LANGGANAN DAYA DAN JASA	1,479,415,000	0	550,469,433	100,747,807	651,217,240	44.02 %	828,197,760
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,000,000	0	4,095,400	659,100	4,754,500	47.55 %	5,245,500
522111 Belanja Langganan Listrik	540,360,000	0	185,157,692	32,388,493	217,546,185	40.26 %	322,813,815
522112 Belanja Langganan Telepon	2,400,000	0	553,167	103,014	656,181	27.34 %	1,743,819
522191 Belanja Jasa Lainnya	926,655,000	0	360,663,174	67,597,200	428,260,374	46.22 %	498,394,626
002.JD PEMELIHARAAN PERKANTORAN	1,183,760,000	0	537,903,160	28,887,000	566,790,160	47.88 %	616,969,840
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	180,240,000	0	0	0	0	0.00 %	180,240,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	687,003,000	0	407,964,000	4,104,000	412,068,000	59.98 %	274,935,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214,779,000	0	64,361,600	17,805,400	82,167,000	38.26 %	132,612,000
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan	101,738,000	0	65,577,560	6,977,600	72,555,160	71.32 %	29,182,840
002.ZF PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.ZG KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.ZH LANGGANAN DAYA DAN JASA	0	0	0	0	0	0.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0.00 %	0
002.ZI PEMELIHARAAN PERKANTORAN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Juni 2025

**Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Unit Organisasi : 12 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Satuan Kerja : 238762 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0.00 %	0
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>42,245,000</b>	<b>0</b>	<b>13,303,063</b>	<b>0</b>	<b>13,303,063</b>	<b>31.49 %</b>	<b>28,941,937</b>
<b>EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>17,319,000</b>	<b>0</b>	<b>6,157,063</b>	<b>0</b>	<b>6,157,063</b>	<b>35.55 %</b>	<b>11,161,937</b>
<b>401 Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Pelatihan Kelautan dan Perikanan</b>	<b>17,319,000</b>	<b>0</b>	<b>6,157,063</b>	<b>0</b>	<b>6,157,063</b>	<b>35.55 %</b>	<b>11,161,937</b>
401.JA Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17,319,000	0	6,157,063	0	6,157,063	35.55 %	11,161,937
521211 Belanja Bahan	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,600,000	0	1,879,000	0	1,879,000	52.19 %	1,721,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,319,000	0	4,278,063	0	4,278,063	32.12 %	9,040,937
<b>EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>15,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,446,000</b>	<b>0</b>	<b>3,446,000</b>	<b>21.95 %</b>	<b>12,254,000</b>
<b>401 Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kelautan dan Perikanan</b>	<b>15,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,446,000</b>	<b>0</b>	<b>3,446,000</b>	<b>21.95 %</b>	<b>12,254,000</b>
401.JA Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kelautan dan Perikanan	5,541,000	0	0	0	0	0.00 %	5,541,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,041,000	0	0	0	0	0.00 %	5,041,000
401.JB Penyusunan Laporan Kinerja Pelatihan Kelautan dan Perikanan	10,159,000	0	3,446,000	0	3,446,000	33.92 %	6,713,000
521211 Belanja Bahan	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,659,000	0	3,446,000	0	3,446,000	51.75 %	3,213,000
<b>EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>9,226,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>40.10 %</b>	<b>5,526,000</b>
<b>401 Pelayanan Keuangan Pelatihan Kelautan dan Perikanan</b>	<b>9,226,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>40.10 %</b>	<b>5,526,000</b>
401.JA Pelayanan Keuangan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9,226,000	0	3,700,000	0	3,700,000	40.10 %	5,526,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,900,000	0	950,000	0	950,000	50.00 %	950,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,326,000	0	2,750,000	0	2,750,000	43.47 %	3,576,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir